

Studi Kualitatif Persepsi Pengurus Gereja Terhadap Pelaporan Keuangan Berbasis Isak 35

**Yusni Warastuti¹; Clara Susilawati²;
Sansaloni Butar-Butar³; Monika Palupi Murniati⁴**

¹yusni@unika.ac.id; ²clara@unika.ac.id;

³sansaloni@unika.ac.id; ⁴palupi@unika.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Soegijapranata

Abstract: *The church as a non-profit oriented entity accepts donations to fund its service activities and donors do not expect a comparable return of economic benefits. Legitimacy theory can be used to explain the position of the church which has a social contract with the people so that it is still necessary to make accountability. Interpretation of Financial Accounting Standards 35 as a substitute for Statement of Financial Accounting Standards No. 45 is a guideline for non-profit oriented entities to present financial statements, including churches. This study aims to explore the understanding of church managers on the components of financial statements and their usefulness. This study is a qualitative research with a phenomenological approach with five church administrators informants on the implementation of ISAK 35 as of January 1, 2020. The method used in this study used interviews with in-depth interviews. The analysis technique in the study after conducting the interview was transcription, description and interpretation of the data obtained. The results showed that the guidelines used to prepare the financial statements of PSAK 45. Other results, the informants already had a basic understanding, namely being able to mention the main accounts in each financial report and provide an explanation of their use, except for the cash flow statement because this report is not a component of financial statements that served. The existing financial reports are sufficient to be used as a basis for church management, starting from planning, controlling and making decisions.*

Keywords : *non-profit oriented entity, legitimacy, financial statements, financial reporting*

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan tata kelola keuangan organisasi non laba, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang menjadi bagian Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan standar pelaporan keuangan PSAK 45 khusus untuk organisasi non laba pada tanggal 23 Desember 1997 yang kemudian direvisi tahun 2011 dan tahun 2019. Pada tanggal 11 April 2019, DSAK mengesahkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35) yang mengatur tentang penyajian laporan

keuangan entitas berorientasi non laba berlaku efektif untuk tahun buku per 1 Januari 2020. ISAK 35 merupakan interpretasi dari PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 05 yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi non laba membuat penyesuaian baik: (i) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan; dan (ii) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. ISAK 35 juga dilengkapi dengan contoh ilustratif dan dasar kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari ISAK 35 (<http://iaiglobal.or.id/>).

Menurut ISAK 35, pengguna laporan keuangan entitas berorientasi non laba memiliki kepentingan untuk menilai: (a) cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka; serta (b) informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik. Kemampuan entitas berorientasi non laba dalam menggunakan sumber daya tersebut dikomunikasikan melalui laporan keuangan.

Seluruh entitas berorientasi non laba terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut diwajibkan untuk menggunakan ISAK 35 sebagai dasar penyajian laporan keuangan. ISAK 35 juga berlaku untuk entitas berorientasi nonlaba yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang nantinya akan menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat. Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba disusun dengan memperhatikan persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan yang telah diatur dalam PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan*.

Lebih jauh, ISAK 35 menjelaskan bahwa entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Entitas berorientasi non laba juga dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan itu sendiri. Entitas berorientasi non laba tetap harus mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan relevan dalam menyajikan laporan keuangannya termasuk catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak mengurangi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

DSAK mempertimbangkan bahwa perbedaan utama antara entitas berorientasi non laba dan entitas bisnis berorientasi laba adalah cara entitas berorientasi non laba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

Gereja sebagai salah satu bentuk entitas yang berorientasi non laba juga menjadi sasaran dari ISAK 35 karena memperoleh pendanaan dari jemaat/umat yang tidak mengharapkan pengembalian manfaat ekonomik yang sebanding dengan sumber daya yang telah diberikan. Gereja juga bisa memperoleh pendanaan dari pihak lain yang berwujud pinjaman dari pengurus gereja pada tingkat yang lebih tinggi, namun dalam ketentuan pinjaman juga berbeda dengan entitas yang berorientasi laba. Lebih jauh lagi para donatur gereja atau pihak lainnya yang memberi sumbangan secara rutin kepada gereja memiliki perspektif yang berbeda dengan donatur organisasi non laba lainnya. Belum tentu mereka memiliki keinginan yang sama seperti para donatur di organisasi non laba lainnya untuk mengetahui bagaimana cara gereja mengalokasikan dana yang telah mereka sumbangkan. Sebagai umat beriman mereka tidak memandang uang yang mereka sumbangkan ke gereja sebagai sesuatu yang perlu dipertanyakan lagi kelanjutannya. Jemaat gereja menganggap sumbangan tersebut merupakan bagian dari pelayanan yang berdampak pada kehidupan kekal sesuai dengan yang mereka percayai.

Berkaitan dengan penerapan ISAK 35 yang baru berlaku efektif pada 1 Januari 2020, maka riset-riset pendahulu yang digunakan sebagian besar masih menggunakan PSAK 45. Beberapa penelitian sebelumnya dengan obyek riset entitas yang berorientasi nonlaba yaitu masjid, gereja katolik dan gereja kristen diantaranya Divina dkk (2020), Munte dan Rahmah (2019), Putri (2018) dan Randa (2011). Diviana dkk (2020) meneliti tentang penyusunan laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK 35 pada masjid Baitul Haadi. Masjid Baitul Haadi sebagai entitas berorientasi non laba hanya menyajikan laporan kas saja, sedangkan laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan belum dilakukan. Demikian juga hasil penelitian di gereja HKBP Maranatha menunjukkan bahwa gereja hanya mencatat

pemasukan dan pengeluaran kas dalam pelaporan keuangan dan belum menerapkan PSAK 45 (Munte,2019). Munte menyebutkan bahwa pelaporan keuangan gereja tidak berdasarkan PSAK 45 karena tidak ada rincian penghitungan aset dan kurangnya pemahaman akuntansi dalam pelaporan keuangan.

Penelitian Putri (2018) tentang analisis penerapan PSAK 45 pada gereja HKBP Kertanegara Semarang menunjukkan hasil bahwa gereja HKBP Kertanegara menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan PSAK 45, dan hanya menyajikan laporan realisasi keuangan sesuai pedoman gereja. Gereja tidak menyusun laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hasil penelitian Sedangkan Randa (2012) menyebutkan bahwa penyusunan laporan keuangan gereja belum direalisasi dengan alasan pedoman keuskupan terlalu sulit dijalankan. Penelitian Randa (2011) juga menyebutkan bahwa transparansi pelaporan keuangan masih setengah hati.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lembaga keagamaan yang merupakan entitas nonlaba belum menerapkan PSAK 45 atau ISAK 35 dalam menyusun laporan keuangan. Padahal ISAK 35 menyebutkan bahwa pengguna laporan keuangan berorientasi nonlaba memiliki kepentingan untuk menilai (1) cara manajemen melaksanakan tanggungjawab atas penggunaan sumber daya (2) informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan. Informasi-informasi tersebut dikomunikasikan melalui laporan keuangan.

Pengurus gereja telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman dari otoritas gereja, namun apakah para pengelola gereja telah benar-benar memahami komponen laporan keuangan yang mereka susun dan mengetahui manfaat dari penyusunan laporan keuangan gereja? Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman pengurus gereja atas komponen dan kebermanfaatan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35.

Kontribusi dari penelitian ini untuk “memotret” pemahaman pengurus gereja yang telah menyusun laporan keuangan. Pemahaman ini terkait dengan komponen setiap laporan keuangan yang ada serta manfaat informasi yang telah tersaji dalam proses pengambilan keputusan oleh pengurus. Dengan proses wawancara secara

mendalam harapannya dapat diketahui mengenai pemanfaatan laporan keuangan yang ada. Selain itu juga dalam proses wawancara juga diberikan wawasan kepada para pengurus tentang penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 yang telah diberlakukan pada 1 Januari 2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Legitimasi

Suchman (1995, p. 574) dalam Burlea (2013) berpendapat bahwa “Legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, pantas, atau sesuai dalam beberapa sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi”. Dalam konsepsi ini, teori legitimasi adalah mekanisme yang mendukung organisasi dalam mengimplementasikan dan mengembangkan pengungkapan sosial dan lingkungan untuk memenuhi kontrak sosial mereka yang memungkinkan pengakuan tujuan mereka dan kelangsungan hidup di lingkungan. Persepsi sosial dari kegiatan organisasi diungkapkan kepada masyarakat. Dalam situasi ketika kegiatan organisasi tidak menghormati nilai-nilai moral, organisasi sangat disetujui oleh masyarakat; sanksi ini bahkan dapat menyebabkan kegagalan organisasi. Organisasi harus menjustifikasi keberadaannya melalui tindakan ekonomi dan sosial yang sah yang tidak membahayakan keberadaan masyarakat di mana perusahaan berada.

Teori legitimasi (*legitimacy theory*) akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengungkapan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dapat mengubah persepsi masyarakat tentang perusahaan. Oleh karena itu, sementara teori agenda *setting* media berpendapat bahwa media massa dapat membentuk persepsi masyarakat tentang isu-isu tertentu, teori legitimasi memberikan argumen yang konsisten dengan pandangan bahwa perusahaan juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat melalui praktik pengungkapan mereka. Teori legitimasi yang berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat menyatakan bahwa organisasi terus mencoba untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat (Deegan *et al.*, 2002).

Meyer dan Rowan (1977) dalam Aziza (2014) berargumen: Organisasi mengintegrasikan elemen rasional yang dilegitimasi secara sosial dalam struktur

formal mereka untuk memaksimalkan sumber daya dan kemampuan bertahan hidup mereka, terlepas dari efisiensi produktif mereka, organisasi yang ada di lingkungan kelembagaan yang sangat rumit dan berhasil menjadi isomorfik dengan lingkungan ini mendapatkan legitimasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan. Sebuah organisasi akan bertahan jika jasa yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Menurut Shocker dan Sethi (1973) meskipun bisnis terus membenarkan legitimasi dan relevansinya dengan masyarakat atas dasar kriteria tradisional, banyak kelompok masyarakat mengungkapkan ketidakpuasan dengan kinerja bisnis dalam memenuhi kebutuhan dan harapan sosial yang berubah. Ketidakpuasan ini, baik berdasarkan informasi yang valid atau tidak, tersebar luas dan persisten.

Berdasarkan teori legitimasi ini maka setiap entitas perlu untuk memberikan informasi kepada semua pihak mengenai kondisi entitas sebagai bentuk pertanggungjawaban; tidak terkecuali entitas berorientasi non laba. Bentuk pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Agar informasi yang disajikan dapat berguna untuk pengambilan keputusan maka informasi tersebut harus relevan dan dapat mempresentasikan secara tepat apa yang direpresentasikan.

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 (ISAK 35)

Pada awalnya DSAK mengeluarkan PSAK 45 tentang pelaporan entitas nirlaba yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 1997 yang kemudian direvisi tahun 2011. Pada 11 April 2019, DSAK mengesahkan ISAK 35 yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba berlaku efektif untuk tahun buku per 1 Januari 2020, yang berarti bahwa PSAK 45 tidak berlaku lagi.

Perbedaan antara PSAK 45 dengan ISAK 35 menurut Gustani (2021), dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.
Perbandingan PSAK 45 dan ISAK 35

No	Item Pembeda	PSAK 45	ISAK 35
1	Klasifikasi aset neto	Dibagi menjadi 3: - tidak terikat - terikat temporer - terikat permanen	Dibagi menjadi 2: - dengan pembatasan - tanpa pembatasan
2	Judul laporan keuangan	Laporan aktivitas, berisi informasi pendapatan dikurangi dengan beban = surplus/defisit tahun berjalan, kemudian ditambah dengan saldo awal menjadi saldo akhir	Laporan penghasilan komprehensif yang hanya memuat informasi sampai surplus/defisit tahun berjalan
3	Laporan perubahan aset neto	Hanya sebagai alternatif	Merupakan bagian dari jenis laporan keuangan entitas non laba
4	Penghasilan komprehensif lain	-	Diakomodasi untuk disajikan
5	Jenis laporan keuangan	Ada 4: a. laporan posisi keuangan b. laporan aktivitas c. laporan arus kas d. catatan atas laporan keuangan	Ada 5: a. laporan posisi keuangan b. laporan penghasilan komprehensif c. Laporan perubahan aset neto d. laporan arus kas e. catatan atas laporan keuangan

Disarikan dari: <https://www.gustani.id/2021>

ISAK 35 mengatur tentang penyajian laporan keuangan berorientasi non laba. ISAK 35 berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 1 (PSAK No 1) tentang Penyajian Laporan Keuangan. PSAK No 1 menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, maka jika entitas dengan aktivitas non laba menerapkan PSAK 1 maka perlu penyesuaian deskripsi. Ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan aktivitas non laba. Entitas non laba dapat menggunakan akun dan nama laporan yang berbeda tetapi dengan tetap memperhatikan ketentuan PSAK 1.

Karakteristik entitas berorientasi non laba berbeda dengan entitas bisnis berorientasi laba. Perbedaan utama yang mendasar antara entitas berorientasi non laba dengan entitas bisnis berorientasi laba terletak pada cara entitas berorientasi non laba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas berorientasi non laba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

ISAK 35 memberikan kewenangan entitas untuk menilai sendiri apakah entitas tersebut merupakan entitas yang berorientasi non laba terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut, sehingga dapat menerapkan interpretasi ini. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan entitas adalah:

- a. Apakah sumber daya entitas berorientasi non laba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan;
- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas berorientasi non laba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas berorientasi non laba tersebut;
- c. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis berorientasi laba, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas berorientasi non laba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas berorientasi non laba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas berorientasi non laba.

Laporan keuangan untuk entitas berorientasi non laba berbeda dengan laporan keuangan untuk entitas berorientasi laba. PSAK 1 ada empat komponen laporan keuangan, sedangkan laporan keuangan entitas berorientasi non laba terdiri dari lima komponen yaitu: laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan non laba adalah menyediakan informasi bagi para penyumbang, anggota entitas berorientasi non laba, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas berorientasi non laba. Entitas berorientasi non laba perlu menyusun 5 jenis laporan keuangan sesuai ISAK 35 yaitu:

1. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan pada entitas non laba bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemberian jasa/layanan entitas berorientasi yang berkelanjutan, menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan pendanaan eksternal. Terdapat 2

(dua) format Laporan Posisi Keuangan yang disajikan sebagai contoh dalam lampiran ini. Setiap format memiliki keunggulan. Format A menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya; atau Format B tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri.

2. Laporan penghasilan komprehensif

Laporan ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah surplus (defisit) dan penghasilan komprehensif lain. Entitas dapat menggunakan judul lain sepanjang penggunaan judul lain mampu mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangannya. Untuk laporan penghasilan komprehensif ada dua format, dengan keunggulan masing-masing:

- a. Format A menyajikan informasi dalam bentuk kolom tunggal sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan secara komparatif. Untuk format ini pengelompokkan aset neto tanpa dan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya disajikan terpisah dengan posisi atas bawah.
- b. Format B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto, yang berarti bahwa pendapatan dan biaya dikelompokkan/disajikan dalam kolom yang berbeda untuk aset neto tanpa dan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya.

3. Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan perubahan aset neto ini menyajikan aset neto pada awal periode, surplus atau defisit periode berjalan, dan saldo akhir periode. Entitas dapat menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan aset netonya sesuai dengan format laporan posisi keuangan.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas dapat disusun dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Tiga aktivitas dalam laporan arus kas terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas memberikan informasi posisi kas pada awal dan akhir periode untuk akun kas dan setara kas.

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi tambahan atas apa yang disajikan di laporan keuangan dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang ada.

Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian-penelitian terkait dengan penyajian laporan keuangan pada entitas berorientasi nonlaba sebagai referensi dalam penelitian ini. Penelitian yang Diviana, dkk (2020) meneliti tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK 35 pada Masjid Baitul Haadi. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35 dengan alat bantu aplikasi Microsoft Excel. Laporan yang dihasilkan berupa laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Munte dan Rahmah (2019) dalam risetnya bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 45 pada salah satu organisasi non profit yaitu gereja HKBP Maranatha di Rawalumbu. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan gereja HKBP Maranatha hanya kas masuk dan keluar dan laporan ini oleh pihak disebut sebagai laporan neraca kas sehingga laporan keuangan yang ada di gereja ini belum sesuai dengan PSAK 45. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penyempurnaan laporan yang telah ada menjadi laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45.

Penelitian Putri (2018) menggunakan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk melihat penerapan PSAK 45 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kertanegara Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gereja belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan format laporan keuangan dalam PSAK 45. Gereja tidak menyusun laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus

kas dan catatan atas laporan keuangan. Gereja hanya menyusun laporan keuangan dalam bentuk laporan realisasi keuangan berdasarkan pedoman yang disusun oleh gereja, meskipun demikian secara garis besar tujuan penyusunan laporan keuangan gereja telah tercapai.

Randa (2011) meneliti akuntabilitas stasi dan gereja paroki di Tana Toraja. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari stasi dilakukan dengan cara diumumkan pada setiap minggu. Untuk gereja paroki laporan keuangan yang diharapkan disajikan yaitu anggaran, laporan neraca, laporan penerimaan dan beban, realisasi anggaran, daftar inventaris, laporan arus kas, dan laporan dana yang dibatasi penggunaannya; namun proses pelaporan belum bisa dijalankan dengan alasan pedoman yang diberikan keuskupan terlalu sulit untuk dijalankan. Yang sudah dilakukan yaitu telah mengumumkan penerimaan pada setiap minggu tetapi tidak diikuti dengan informasi penggunaan dana dan saldo akhir kas yang ada di paroki.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Fenomenologi

Untuk memahami lebih mendalam apa yang dirasakan, dipersepsikan, dan dimengerti orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan gereja terhadap pelaporan keuangan berbasis ISAK 35, peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dengan melakukan wawancara secara terbuka secara objektif. Karena itu, pendekatan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik fenomenologi.

Kekuatan dari pendekatan fenomenologi adalah kemampuan untuk mendeskripsikan fenomena apa adanya (netral) tanpa memasukkan pemikiran, persepsi atau pendapat peneliti mengenai fenomena yang diteliti (Alase, 2017). Peneliti memposisikan dirinya sebagai pihak yang mengumpulkan pendapat dari informan dan memahami suatu fenomena menurut persepsi informan, sehingga tidak ada manipulasi data. Pendekatan ini juga mendeskripsikan dan memahami suatu fenomena secara utuh dari persepsi para informan dengan variasinya.

Sampel

Sampel yang dipilih dalam penelitian kualitatif sering disebut dengan informan. Melalui pandangan-pandangan, tindakan, dan nilai-nilai yang diyakini informan, peneliti kualitatif mencoba untuk memahami realitas dari sudut pandang informan. Pemilihan informan ditentukan berdasarkan keterlibatan mereka dalam pengelolaan keuangan dan administrasi gereja. Informan terdiri dari lima (5) orang pengurus gereja.

Sumber Data

Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sasaran yang ingin dicapai pada saat melakukan wawancara adalah merekonstruksi pikiran, perasaan, motivasi informan tentang laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan seperti yang dimaksud dalam ISAK 35. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap (*ongoing basis*). Peneliti melakukan observasi secara terus menerus sambil melakukan wawancara yang mendalam serta meneliti berbagai dokumen yang relevan dengan fenomena yang menjadi perhatian.

Teknik wawancara terbuka dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang standar (baku). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan cara pengajuannya sama untuk semua informan. Ini penting agar proses rekonstruksi realitas antara dari satu informan ke informan lain dapat dilakukan dengan konsisten sehingga menghasilkan satu rekonstruksi yang komprehensif yang mewakili perspektif informan secara kolektif. Wawancara terbuka dengan pertanyaan baku dapat mengurangi perbedaan-perbedaan atau variasi antara pewawancara satu dengan yang lainnya. Wawancara dilakukan dalam jaringan (*daring*) *gmeet*.

Teknik Analisa Data

Prosedur analisis data kualitatif dengan melibatkan proses menganalisis, melakukan sintesis, dan mereduksi informasi dari berbagai sumber menjadi deskripsi yang koheren tentang fenomena yang menjadi perhatian (Frankel, 2012). Interpretasi data dilakukan secara terus menerus selama wawancara berlangsung. Langkah-langkah untuk melakukan analisis data sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan wawancara dengan informan yang akan dilakukan secara daring. Wawancara dilakukan selama 60 – 90 menit dan direkam dalam bentuk *audio recording*.
2. Melakukan transkripsi data hasil wawancara. Hasil wawancara berupa data audio (rekaman wawancara)
3. Melakukan deskripsi dan interpretasi pada data yang telah didapatkan. Hasil interpretasi dikaitkan dengan teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Informan

Penelitian menggunakan 5 orang informan terdiri dari 3 orang yang memiliki tanggung jawab dalam pembuatan keputusan terhadap pengelolaan seluruh keuangan gereja dan 2 orang yang terlibat aktif dalam proses pelaporan laporan keuangan dan memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan saat pembuatan keputusan.

Adapun detail informan adalah sebagai berikut:

1. Informan A. Informan ini bertugas untuk melakukan inputing bukti transaksi sampai dengan laporan keuangan. Informan A juga memiliki tugas mempresentasikan laporan keuangan kepada para pengurus dalam forum rapat pengurus.
2. Informan B. Informan ini bertanggung jawab atas semua kegiatan gereja, termasuk dalam hal pelaporan dan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan laporan keuangan.
3. Informan C. Informan ini bertugas menyediakan laporan keuangan gereja dan memiliki Pendidikan S1 Akuntansi dan bekerja pada bidang akuntansi.
4. Informan D. Informan D memiliki tanggung jawab atas pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan gereja, tata kelola administrasi dan keuangan.
5. Informan E. Informan E memiliki latar belakang dalam bidang akuntansi dan keuangan serta bertanggung jawab penuh dalam mengatur keuangan gereja, mulai dari pencatatan pemasukan/pengeluaran hingga membuat laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana gereja. Beliau juga telah mengikuti dua kali pelatihan tentang PSAK 45 (standar pelaporan nirlaba sebelum diganti dengan ISAK 35).

Pembahasan Umum

Gereja sebagai entitas non laba mengandalkan sumber pendanaan dari umat/jemaat untuk mendukung seluruh aktivitas/program kerja pastoral/gereja. Teori legitimasi menjelaskan pentingnya posisi gereja sebagai suatu entitas yang memiliki kontrak sosial dengan umat, melalui dana yang diberikan kepada umat dan keseluruhan pengelolaan gereja serta program kerja rutin dan visioner. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan gereja, baik dewan paroki atau majelis, berkewajiban untuk memberikan pelayanan gerejawi dalam rangka memelihara dan meningkatkan iman jemaat/umat melalui seluruh yang dilakukan. Teori legitimasi mengisyaratkan bahwa suatu organisasi harus menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi sesuai dengan batasan dan norma (Deegan *et al.*, 2002).

Gereja sebagai subyek penggerak umat berkewajiban melaksanakan program-program kerja sehingga umat mengalami keselamatan dan transformasi hidup ke arah yang lebih baik (PDPP, 2020). Agar tujuan ini dapat tercapai, pihak gereja harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan produktif sehingga misi pelayanan gereja dapat diwujudkan. Pengelolaan dana yang efektif dan produktif hanya mungkin dilakukan apabila tersedia informasi yang andal dan relevan dalam mengalokasikan dana jemaat/umat. Sumber informasi penting yang dapat memenuhi kebutuhan para pengelola gereja adalah laporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan dapat bermanfaat untuk membantu pengelola gereja menetapkan program-program yang sesuai misi gereja sehingga umat merasakan bahwa gereja hadir untuk melayani mereka.

Tidak hanya perencanaan, laporan keuangan juga bermanfaat untuk tujuan pengendalian. Pengelola gereja perlu mengetahui apakah program-program yang telah ditetapkan berjalan sesuai harapan dan tidak terjadi penyimpangan. Ketersediaan informasi yang andal dan relevan mengharuskan pihak pengelola gereja memahami prosedur penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam hal ini, standar pelaporan keuangan untuk organisasi non laba

yang wajib digunakan adalah ISAK 35 (PSAK 45). ISAK 35 sebagai standar penyusunan pelaporan keuangan terbaru yang menggantikan PSAK 45 secara esensial sama dan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Karena itu, pembahasan persepsi para informan tentang pelaporan keuangan organisasi nonlaba mengacu pada ISAK 35 atau PSAK 45.

Keberadaan ISAK 35

Secara umum para informan mengetahui keberadaan standar pelaporan keuangan yang telah ditetapkan badan otoritas akuntansi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, yaitu ISAK 35 atau sebelumnya PSAK 45. Informan lebih mengetahui tentang PSAK 45 karena ISAK 35 baru diberlakukan efektif 1 Januari 2020 dan informan lebih sebagai pelaksana kebijakan, sehingga untuk pembahasan berikutnya lebih menggunakan PSAK 45. Walaupun secara umum informan mengetahui keberadaan PSAK 45, tampaknya informan satu dengan yang lain memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Dari wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa pengurus gereja yang bertugas menyiapkan laporan keuangan lebih memahami keberadaan PSAK 45 daripada pengurus gereja lainnya.

Penjelasan lain karena pengurus yang menyediakan laporan keuangan berpendidikan sarjana akuntansi yang saat ini atau pernah bekerja pada bidang akuntansi dan kantor akuntan publik. Perbedaan diantara keduanya terlihat dalam hal memahami konsep dan praktik pelaporan keuangan. Respon para informan terkait dengan keberadaan ISAK 35 mengindikasikan bahwa lambatnya penerapan ISAK 35 dikalangan gereja bukan akibat dari ketidaktahuan tentang keberadaan ISAK 35, tetapi para informan lebih sebagai pelaksana sebuah kebijakan dari otoritas yang lebih tinggi.

Laporan Posisi Keuangan

Pertanyaan tentang laporan posisi keuangan dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman informan tentang laporan posisi keuangan dan manfaatnya. Respon yang diberikan informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan laporan posisi keuangan menunjukkan bahwa hampir semua informan memahami laporan posisi keuangan dan elemen-elemen yang terkandung di dalamnya. Walaupun secara umum sudah mengenal laporan posisi keuangan dan elemen-

elemen yang terkandung di dalamnya, pemahaman tentang arti penting elemen-elemen laporan posisi keuangan tampaknya masih belum sama diantara para informan. Ada kecenderungan bahwa mereka lebih mementingkan kas daripada elemen yang lain sehingga cenderung mengabaikan yang lain.

Respon yang diberikan informan tentang manfaat laporan posisi keuangan cukup seragam. Beberapa informan memberi jawaban yang sangat sederhana dalam menjawab pertanyaan tentang manfaat laporan posisi keuangan. Mereka tampaknya menyetarakan manfaat laporan posisi keuangan secara keseluruhan dengan kas yang merupakan salah satu elemen di dalamnya. Mereka menganggap kas merupakan elemen yang paling penting dari yang lain dan bahkan lebih penting dari laporan posisi keuangan secara keseluruhan. Sebagian besar informan mengatakan bahwa laporan posisi keuangan memungkinkan mereka mengetahui posisi kas sehingga bisa membuat keputusan penting tentang jumlah kas yang bisa dikeluarkan untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

Informan lain memberi jawaban yang cukup relevan dengan mengatakan bahwa laporan posisi keuangan bermanfaat untuk mengevaluasi program-program yang telah dijalankan sebagai dasar dalam menentukan program-program gereja di masa mendatang. Namun ketika pertanyaan lanjutan diberikan tentang alasan gereja belum menerapkan ISAK 35 (PSAK 45), informan tersebut mengatakan gereja belum memiliki daftar inventaris aset gereja. Ini menghalangi mereka untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Jawaban-jawaban yang diberikan informan mengindikasikan bahwa sesungguhnya mereka paham arti penting laporan posisi keuangan dalam menunjang kegiatan gereja.

Laporan Penghasilan Komprehensif

Pertanyaan tentang laporan penghasilan komprehensif dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman tentang elemen-elemen pendapatan komprehensif dan manfaatnya. Respon yang diberikan para informan menunjukkan bahwa secara umum mereka mengenal laporan penghasilan komprehensif menurut ISAK 35 tetapi menyamakannya dengan laporan aktivitas dalam PSAK 45. Walaupun istilah laporan penghasilan komprehensif dan laporan aktivitas penyebutannya berbeda, secara esensi keduanya hampir sama. Berkaitan dengan manfaatnya, respon

informan mengindikasikan bahwa mereka memahami manfaat elemen-elemen laporan penghasilan komprehensif. Namun tampak dengan jelas bahwa informan lebih mementingkan ketersediaan kas yang diperoleh dari donatur/jemaat untuk mendanai program-program gereja.

Para informan mampu menggunakan elemen penerimaan untuk mengevaluasi cara-cara kolekte sebagai sumber penerimaan utama yang menurun saat pandemi, penundaan pengadaan aset dan dialihkan ke kegiatan kemanusiaan sampai dengan penggunaan penerimaan untuk melakukan prediksi penerimaan dalam penyusunan rencana program kerja ke depan.

Pemahaman para informan tentang elemen-elemen laporan penghasilan komprehensif serta manfaatnya untuk menyusun rencana-rencana ke depan tampaknya bukan halangan bagi gereja untuk mengadopsi ISAK 35 secara penuh. Tampaknya kendala utama terletak pada persepsi bahwa gereja hanya perlu informasi tentang kas untuk memastikan bahwa seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mendukung program gereja masih tersedia atau sudah menipis.

Laporan Arus Kas

Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan laporan arus dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman informan tentang elemen-elemen laporan arus kas dan manfaatnya. Respon yang diberikan para informan menunjukkan bahwa sebagian besar mengerti tentang laporan arus walaupun belum pernah membuat atau melihat secara langsung bentuk dari laporan arus kas gereja. Dari respon informan dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka belum pernah melihat laporan arus kas resmi dari gereja dan ada respon dari informan lain yang menunjukkan informan paham tentang laporan arus kas walaupun laporan arus kas yang ada di gereja saat ini hanya sekedar laporan pendapatan dan pengeluaran kas.

Pemahaman para informan tentang laporan arus kas secara relatif baik. Kondisi seharusnya tidak menjadi penghalang bagi gereja dalam menerapkan secara penuh ISAK 35. Mungkin yang menjadi penghalang adalah persepsi manfaat laporan arus kas yang belum dipahami secara lengkap dan cenderung direduksi hanya sebagai laporan kas keluar dan kas masuk semata.

Kebermanfaatan Laporan Keuangan

Berdasarkan pada analisis mengenai kebermanfaatan laporan keuangan terhadap pada informan, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang ada bermanfaat dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan yang ada memiliki nilai relevan. Informasi relevan karena memiliki kemampuan prediktif dan juga umpan balik. Kemampuan prediktif dapat ditunjukkan bahwa informasi yang tersaji dapat digunakan untuk melakukan perencanaan mengenai kemungkinan sumber dan pemanfaatan dana untuk setiap program kerja pelayanan yang tersaji dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). Dengan berjalannya waktu laporan keuangan yang tersaji dapat digunakan untuk proses evaluasi atau pengendalian atas apa yang terjadi dengan rencana yang ada. Dalam proses pengendalian ini kemudian bisa juga disusun strategi baru guna mencapai target yang telah dirumuskan dalam rencana.

PENUTUP

Kesimpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pengelola gereja memiliki pemahaman dasar mengenai laporan keuangan, yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas, menurut yang disyaratkan oleh PSAK 45. ISAK 35 yang diberlakukan mulai 1 Januari 2020, memiliki beberapa perbedaan dengan PSAK 45, tetapi pengelola gereja tidak mengenal dan memahami dengan baik laporan keuangan menurut ISAK 35. Pemahaman dasar yang dimaksud adalah informan dapat menyebutkan akun utama dalam tiap-tiap laporan keuangan dan memberikan penjelasan kegunaan elemen dalam tiap-tiap laporan keuangan. Laporan arus kas merupakan pengecualian dalam penelitian ini, karena laporan ini tidak digunakan.
2. Dalam hal manfaat, pengelola gereja memiliki kemampuan untuk menggunakan elemen-elemen dalam laporan keuangan sebagai dasar perencanaan saat menyusun RAPB, sebagai informasi untuk melakukan

pengendalian sehingga dapat membuat keputusan yang tepat. Beberapa pembuatan keputusan yang tampak saat kondisi pandemi adalah pengalihan dana untuk mendukung para korban covid-19 seperti obat-obatan, pangan dan bantuan pendidikan, penundaan pengadaan aset, dan kegiatan rutin lain.

3. Belum diterapkannya ISAK 35 atau PSAK 45 secara penuh bukan disebabkan oleh rendahnya pemahaman tentang komponen-komponen laporan keuangan dan kebermanfaatannya tetapi lebih pada belum dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk menerapkan ISAK 35. Dengan laporan yang ada saat ini, gereja merasa kebutuhan informasi yang mereka butuhkan sudah tercukupi. Faktor lain yang menjadi penghalang yaitu belum tersedianya catatan-catatan yang dapat diandalkan tentang jumlah dan nilai aset yang saat ini dimiliki gereja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alase, A. 2017. The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Research Approach. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 5 (2):9-19
- Aziza, N. 2014. Antecedent Pengungkapan Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Image Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia). *Jurnal Fairness* 14 (1):1-21.
- Bogdan, R. C. and S.K Biklen 2007. *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*, 5th ed. Boston: Allyn & Bacon.
- Burlea, S.A.; and I. Popa 2013, Legitimacy Theory, in Encyclopedia of Corporate Social Responsibility, Editors Samuel O. Idowu, Nicholas Capaldi, Liangrong Zu, Ananda das Gupta, Springer Berlin Heidelberg, Diunduh dari:
<http://www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/333348.html>
- Deegan, C; M. Rankin; and J. Tobin. 2002. An Examination Of The Corporate Social And Environmental Disclosures Of BHP From 1983-1997: A Test Of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. 15 (3): 312-343.
- Diviana, S; R.P Ananto; W. Andriani; R. Putra; A. Yentifa, Zahara, dan A. Siswanto. 2020. Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi

Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 Pada Masjid Baitul Haadi. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. 15: 113 – 132.

Fraenkel, J. R; N.E Wallen; and J.H Hyun. 2012. *How To Design and Evaluate Research In Education*. McGraw Hill.

Gustani. 2021. Pencabutan PSAK 45 dan Penerapan ISAK 35: Dampaknya Terhadap Pelaporan Keuangan Yayasan. Diunduh dari : <https://www.gustani.id/2021/02/pencabutan-psak-45-dan-penerapan-isak.html#>

Hilal, A. H; and S.S Alabri. 2013. Using NVIVO for Data Analysis in Qualitative Research. *International Interdisciplinary Journal of Education*. 2 (2):181—186.

Ikatan Akuntan Indonesia (2011), “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45: Pelaporan Keuangan Entitas berorientasi Nonlaba Edisi Revisi”, Jakarta, Salemba Empat.

_____ (2020), “ Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba”, Jakarta, Salemba Empat.

Keuskupan Agung Semarang (2008), “Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki”, Semarang.

_____ (2018), “Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Paroki”, Semarang .

_____ (2020), “Pedoman Dasar Pelayanan Pastoral Paroki”, Semarang.

Memo Uskup Agung Semarang No: 0459/c/a-4/08 tentang Rekomendasi Pemakaian Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki.

_____ No: 1172/C/a-4/17 tentang Rekomendasi Pemakaian Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Paroki (PPAP).

Munte,F.B; dan M. Rahmah. 2019. Perlakuan Akuntansi Organisasi Nirlaba Terkait Dengan PSAK 45 Tahun 2017 Pada Gereja HKBP Maranatha. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*. 6 (1):29-35.

Putri, T. S. 2018. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Pada Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kertanegara Semarang.
Diunduh dari <https://core.ac.uk/download/pdf/35383062.pdf>

- Randa, F. 2011. Akuntabilitas Keuangan dalam Organisasi Keagamaan (Studi etnografi pada sebuah Gereja Katolik di Tana Toraja). *Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi*. 9:59-83.
- Shocker, A.D, S.P Sethi. 1973. An Approach to Incorporating Societal Preferences in Developing Corporate Action Strategies. *California Management Review*;15(4):97-105.
- Surat Keputusan Uskup Agung Semarang No 398/c/a-4/02 tentang Administrasi Keuangan Paroki.
- Strauss, A; and J.Corbin. 1998. *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory*.2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Tim Akuntansi Keuskupan Agung Semarang. 2018. *Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Paroki*. Yogyakarta: Kanisius.